

# STRATEGI UNIT PENANGANAN KONFLIK DI KABUPATEN CIAMIS OLEH BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIAMIS

Dicky Firman Gani<sup>1</sup>, Lina Maliani<sup>2</sup>, Ahmad Juliarso<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

*E-mail : dickyfirman1234@gmail.com*

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi Strategi Penanganan Konflik Di Kabupaten Ciamis Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Kewaspadaan Nasional, belum terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas, Serta terbatasnya anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data serta verifikasi. Secara umum kurang dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tiga tahapan dalam proses strategi manajemen sektor publik menurut David (Bastian, I. 2016:12), seperti: Belum berjalannya formulasi strategi penanganan konflik, belum adanya implementasi dalam strategi penanganan konflik serta belum maksimalnya evaluasi strategi penanganan konflik. Adapun hambatan-hambatan diantaranya pengembangan strategi dalam penanganan konflik belum sepenuhnya berkembang, masih adanya kelemahan dalam strategi penanganan konflik, perumusan strategi alternatif dalam penanganan konflik yang kurang maksimal, struktur organisasi yang belum efektif, kurangnya persiapan anggaran dalam strategi penanganan konflik, kurangnya pengukuran kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam strategi penanganan konflik.*

**Kata Kunci :** *Strategi, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan politik*

## PENDAHULUAN

Dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia selama ini telah menunjukkan terjadinya perubahan-

perubahan yang sangat fundamental. Dimana dengan adanya perubahan-perubahan tersebut memerlukan berupa perhatian, kepedulian, serta kewaspadaan seluruh warga negara dan

para penyelenggara negara. Suatu proses globalisasi saat ini yang tak bisa mungkin dapat dihindari yang akan menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Berupa masalah keamanan dan ketertiban umum menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia yang berada di tengah era reformasi yang sedang berjalan ini. Oleh karena itu, segala perseteruan atau benturan dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Maka dalam bidang keamanan menuntut adanya komitmen bersama yang kuat bagi segenap komponen bangsa untuk mengelolanya.

Konflik menjadi suatu kondisi yang perlu diperhatikan secara baik. Hal ini karena konflik merupakan kekuatan yang saling bertentangan antar pihak yang tidak cocok satu sama lain terkait persaingan tujuan yang ingin dicapainya. Dengan kata lain konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk menghalangi atau mengganggu pihak lain dalam usahanya mencapai suatu tujuan. Perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar lebih banyak pada aspek kebutuhan dan perbedaan kebutuhan antara semua pihak yang terlibat. Sehingga konflik tersebut bisa berkembang menjadi konflik antar kelompok.

Konflik antar kelompok dapat terjadi dalam bentuk konflik antar ras atau suku bangsa, misalnya antar ras yang berkulit putih dengan individu dari ras yang berkulit hitam. Hal yang

terjadi biasanya setiap kelompok merasa bahwa dirinya lebih baik sehingga timbul saling mencemooh dan berakhir pada permusuhan. Ada pula perasaan bangga terhadap budaya daerah sehingga dapat menyebabkan suku bangsa tertentu mendominasi suku bangsa lain yang akhirnya menimbulkan konflik. Konflik antar kelompok dapat pula terjadi antar kelas-kelas sosial, terutama terjadi pada sub-sub sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan proporsional sehingga kelompok masyarakat merasa terabaikan.

Sesuai dalam Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa konflik sosial yang selanjutnya disebut dengan Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Maka dari itu konflik bukan merupakan suatu kondisi yang biasa diabaikan tanpa ditindaklanjuti melainkan perlu tangani agar tidak merambat terhadap tujuan yang dicapai.

Beragam kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis merupakan suatu kondisi yang membuat resah warga Kabupaten Ciamis. Maka dalam kondisi ini perlu diupayakan dan merupakan suatu hal yang penting

untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar bertindak dalam melakukan strategi penanganan konflik, pencegahan serta penyelesaiannya. Semenjak tahun 2019 kasus yang berpotensi di kabupaten Ciamis ini menjadi konflik yang cukup beragam, seperti menurunnya pemahaman Pancasila, bangkitnya paham komunis yang ditandai dengan munculnya atribut-atribut komunis, konflik pendirian rumah ibadah, sengketa lahan, aksi massa solidaritas kemanusiaan, rawan isu hoax dan sara, tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan, tidak semua SDM Aparatur Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis memiliki kemampuan IT, serta fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai.

Penanganan konflik merupakan suatu upaya yang perlu dilaksanakan secara optimal. Pada dasarnya penanganan konflik sama halnya dengan pengurusan, penindakan serta penyelesaian. Namun pada kenyataannya penanganan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis masih bersifat memadamkan api semata. Adapun minimnya perhatian atau penanganan konflik terhadap permasalahan konflik ini bisa disebabkan karena kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber pendanaan bahkan terkait dengan ketiadaan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang jelas

bagi Pemerintah sebagai panduan untuk bertindak.

Upaya pemerintah dalam rangka penanganan konflik baik dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik sudah dilakukan. Adapun upaya pemerintah ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah membangun sistem kelembagaan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang. Penanganan konflik tersebut melibatkan semua komponen masyarakat, untuk secara bersama-sama menyatukan visi dan misi dalam melakukan upaya penanganan konflik. Bahwa dalam melakukan Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi maka dibentuk Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna akan menghasilkan konflik. Adanya keberagaman budaya tersebut tentunya akan mengancam terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan disintegrasi yang berdampak pada kehancuran bangsa. Sehingga kewaspadaan nasional perlu diciptakan dengan berdasar pada nilai-nilai semangat nasionalisme, agar dapat mengawal jalannya proses integrasi

nasional dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dapat tercapai.

Peningkatan kewaspadaan nasional merupakan sebuah prasyarat penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional khususnya di Kabupaten Ciamis. Untuk tujuan tersebut, salah satu instrumen terpenting dalam hal ini adalah strategi integrasi nasional yang dilandasi oleh ikatan kebangsaan yang kokoh. Oleh sebab itu, penguatan kewaspadaan nasional merupakan hal yang mutlak. Apabila Kabupaten Ciamis ingin tetap terjaga keberadaan, keberlangsungannya serta mampu menjadikan dirinya sebagai Kabupaten yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan upaya optimalisasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam rangka menjaga kesatuan bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis memiliki tugas salah satunya dalam penanganan konflik sosial dan mewujudkan kewaspadaan nasional di wilayah Kabupaten. Oleh karena itu, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis dalam penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional khususnya di Kabupaten Ciamis, semua tugas pokok dan fungsi akan dilaksanakan dengan program kerja yang telah disusun yang

dilaksanakan dalam satu tahun demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur.

Berdasarkan hasil studi peninjauan dan wawancara awal yang telah dilakukan, diketahui Strategi Penanganan Konflik di Kabupaten Ciamis Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum optimal. Sehingga masih ditemukan beberapa kendala dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kewaspadaan nasional. Hal ini menyebabkan kurangnya penanganan konflik yang dilakukandan pegawai lebih memfokuskan pada tugas dan tanggung jawablain.
- 2) Belum terbentuknya Tim terpadu pengawasan Ormas. Sehingga menyebabkan perbedaan persepsi dan peran ormas yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya ormas yang berpotensi menimbulkan konflik terhadap fungsi dan tujuan ormas menjadi tidak terlaksana.
- 3) Terbatasnya anggaran. Hal ini menyebabkan kegiatan banyak terhambat oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial daerah yang masih bertumpu pada pemerintah pusat.

Munculnya Permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi strategi penanganan konflik

dikabupaten ciamis oleh bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten ciamis.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Strategi penanganan konflik dikabupaten ciamis oleh bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten ciamis.**

## **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam setiap organisasi Pemerintah atau perusahaan selalu mempunyai rencana dalam melakukan apa yang akan dilakukan di masa depan. Adanya rencana tersebut biasanya sebuah organisasi atau perusahaan mempunyai strategi untuk mencapai rencana yang telah mereka rancang atau rencanakan. Dengan adanya strategi rencana yang akan mereka jalankan biasanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh organisasi.

### **1. Pengertian Strategi**

Adapun Penegertian Strategi Menurut Bracker (Afif dan Abdullah 2010:71) menyatakan bahwa:

Strategi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktifitas dimana suatu organisasi, baik secara kebetulan ataupun perencanaan, berupaya mengembangkan sarana-sarananya, dan kemudian memanfaatkannya untuk menciptakan barang dan/ atau jasa

dengan tetap mempertimbangkan tujuan-tujuan berikut batasan-batasan yang digariskan para *stakeholder* organisasi, sehingga kehadirannya dirasakan bermanfaat oleh para pelanggannya.

Kemudian menurut Mintzberg (Afif dan Abdullah, 2010: 54-55) strategi memiliki konsep yang sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsisten ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Merujuk Kepada Strategi

Menurut Nutt dan Backoff

(Muhammad, 2012:64) menyatakan bahwa dalam mendesain strategi ada enam tahapan, yakni:

1. Konteks sejarah
2. Penilaian situasi

3. Agenda isu strategis
4. Opsi strategi
5. Penilaian kelayakan
6. Implementasi strategi

Adapun menurut Porter (Bastian, I. 2016:10) mengatakan bahwa: 'Alasan kesuksesan dan kegagalan perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh strategi yang digunakannya'.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen sektor publik berperan membantu organisasi saat menghadapi masalah dan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Oleh karena itu, mengingat perannya yang sangat menentukan, maka penentuan strategi menjadi hal penting yang harus dilakukan masing-masing organisasi.

David (Bastian, I. 2016:12) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam proses strategi manajemen sektor publik, sebagai berikut:

Formulasi strategi, terdiri dari aktivitas mengembangkan visi dan misi organisasi sektor publik, mengidentifikasi/menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi alternatif, serta memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

- a. Implementasi strategi, terdiri dari aktivitas mengembangkan budaya pendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, serta menghubungkan

kinerja pegawai dengan kinerja organisasi sektor publik.

- b. Evaluasi strategi, merupakan tahapan terakhir yang terdiri dari aktivitas meninjau ulang faktor internal dan eksternal organisasi sektor publik. Dasar strategi pada tahapan ini adalah mengukur kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan

## 2. Prinsip Strategi

Adapun Prinsip Menyukkseskan strategi Menurut Hatten dan Hatten (1988):

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus dan perkembangan dalam masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila banyak startegi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan yang tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-

- kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatan dan tidak pada titik-titik kelemahannya. Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempatkan posisi kompetitif yang lebih kuat.
  5. Sumber daya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah suatu yang mungkin, haruslah membuat suatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
  6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.
  7. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke lobang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi haruslah selalu dikontrol.
  8. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan.
  9. Tanda-tanda dari suksesnya strategi dinampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan terutama dari para eksekutif dan semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

### 3. Manajemen Strategi

Menurut Yunus, (2016:5) menyatakan bahwa “Manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis”.

Yunus, (2016:6) Mengatakan bahwa “Manajemen strategis senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi manajemen itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.” Sejalan dengan hal tersebut, berikut ini akan dipaparkan berbagai karakteristik manajemen strategis:

1. Manajemen strategis bersifat jangka panjang
2. Manajemen strategis bersifat dinamik
3. Manajemen strategis merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional
4. Manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak
5. Manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan
6. Manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

### 4. Tentang Konflik

Menurut Aldag, R. J dan Stearns, T. M (dalam Wahyudi, 2015: 18) “Mengartikan konflik adalah ketidak

sepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan”.

Kemudian Merujuk Kepada pendapat Coser (Ahmadi, 2009: 281) berpendapat bahwa “Konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langkah dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan”.

Gillin (Ahmadi, 2009: 282) menyatakan bahwa:

Melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (*oppositional process*). Artinya, konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada didalam konflik adalah persepsi, aspirasi dan aktor yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu konflik sosial merupakan perbedaan pikiran, pandangan serta kepentingan seorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya konflik sosial adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosialbudaya;
2. Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat baeragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan

Distribusi sumber daya alam yang tidakseimbang dengan masyarakat Sementara itu Mangkunegara (2009:48) merumuskan ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemimpin dan rakyat dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain yaitu:

1. *Pertama*, menghindari. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Menghindar merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Pemimpin yang terlibat didalam konflik dapat menepiskan isu agar kedua pihak yang berkonflik mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi.



2. *Kedua*, mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.
  3. *Ketiga*, kompetisi. Gunakan metode ini jika anda percaya bahwa anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan.
  4. *Keempat*, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.
  5. *kelima*, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya.
- Sedangkan Gibson (Gunawan dan Rante, 2011:347) menyumbangkan konsep bagi langkah penyelesaian konflik yang efektif antara lain yaitu:
1. *Pertama*, menjabarkan kepentingan. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui, dengan memudahkan pencarian kepentingan yang sama dan tidak berkonflik dari kedua kelompok; dengan membicarakan kepentingan setiap kelompok kepada yang lain tanpa menyorot secara tidak pantas kelompok yang lain untuk memaksakan kepentingan dengan dasar kepentingan tertentu.
  2. *Kedua*, membangun hubungan kerja yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui, memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengatasi perbedaan-perbedaannya dalam perdebatan yang hangat; memelihara jenis hubungan yang diinginkan oleh kelompok tapi sesuai; mempermudah kelompok untuk mengatasi bersama-sama bila konflik timbul lagi.

3. *Ketiga*, memberikan pilihan yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui, memacu kelompok untuk sumbang saran beberapa pilihan sebelum mengevaluasi mereka dan memilih di antara mereka mendorong/memberi semangat kepada kelompok untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan nilai-nilai untuk perolehan bersama.
4. *Keempat*, dilihat sebagai keabsahan. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui : dengan tidak dipandang oleh kelompok sebagai pengganggu; (b) dengan menanamkan pada kelompok rasa bahwa penyelesaian yang dibuat akan adil dan memadai.
5. *Kelima*, pengenalan alternatif prosedural suatu pihak. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh dengan membolehkan kedua pihak untuk mengembangkan penilaian mereka sendiri yang realistis dan alternatif pokok pihak lain.
6. *Keenam*, memperbaiki komunikasi. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui, : memperbanyak pertanyaan dan pengujian dari yang menjadi dasar perkiraan; mempermudah pengertian dan diskusi dari pandangan pengikut; (c) membentuk komunikasi antar kelompok dua arah yang efektif.
7. *Ketujuh*, mengarahkan kekomitmen yang bijaksana. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui memberi kesempatan kelompok untuk merancang kebijaksanaan yang realistis, operasional dan cenderung terlaksana menempatkan pihak-pihak dengansumber yang efektif untuk acara di kejadian yang mereka gagal untuk mencapai persetujuan akhir atau kejadian yang tidak terlaksana.  
Dengan demikian Strategi penanganan konflik dikabupaten ciamis oleh bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten ciamis dapat tercapai apabila unsur-unsur pendukung tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 7 bulan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data

kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk Mengetahui Strategi penanganan konflik dikabupaten ciamis oleh bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten ciamis peneliti menggunakan Variabel Variabel yang mempengaruhi berjalan nya strategi

Mengacu teori menurut David (Bastian, I. 2016:12) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam proses strategi manajemen sektor publik, sebagai berikut:

1. Formulasi strategi
2. Implementasi strategi
3. Evaluasi strategi

### **1. Formulasi Strategi**

#### **a. Adanya pengembangan strategi dalam penanganan konflik.**

Formulasi strategi ini sangat penting untuk dilaksanakan karena adanya keterbatasan yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga misalnya keterbatasan sumber dana dan kemampuan, jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan, sehingga perlu disusun strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga sesuai dengan kemampuan, tujuan utama kegiatan formulasi strategi ialah pembuatan tujuan rasional.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa adanya kelemahan dan kelebihan dalam strategi penanganan konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan

Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum terlihat kelebihannya dengan baik. Dimana proses pelaksanaan strategi penanganan konflik ini didominasi oleh kelemahan yang belum tertangani. Dalam hal ini tentunya sumber daya pegawai yang ada sebagai pelaksana dalam melakukan strategi tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini pun menjadi sebuah penentuan strategi yang digunakannya menjadi tidak berjalan dengan lancar.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Porter (Bastian, I. 2016:10) mengatakan bahwa: 'Alasan kesuksesan dan kegagalan perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh strategi yang digunakannya'.

#### **b. Adanya kelemahan dan kelebihan dalam strategi penanganan konflik**

konflik membangkitkan sebuah kesadaran mengenai batasan- batasan, baik bagi anggota tim secara individu maupun kelompok secara keseluruhan. Adanya perselisihan dan perbedaan memberikan gambaran jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang mampu dicapai dan mustahil diwujudkan, serta kapan tim harus maju maupun menahan diri. Pentingnya memegang integritas dan menjaga rasa hormat (mutual respect) turut tercetus dalam upaya penanganan konflik. Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa adanya kelemahan dan kelebihan dalam strategi penanganan konflik Oleh

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum terlihat kelebihannya dengan baik. Dimana proses pelaksanaan strategi penanganan konflik ini didominasi oleh kelemahan yang belum tertangani. Dalam hal ini tentunya sumber daya pegawai yang ada sebagai pelaksana dalam melakukan strategi tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini pun menjadi sebuah penentuan strategi yang digunakannya menjadi tidak berjalan dengan lancar.

**c. Adanya penetapan tujuan dalam strategi penanganan konflik**

penetapan tujuan dalam strategi penanganan konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Hal ini dikatakan oleh informan bahwa penetapan tujuan dalam strategi penanganan konflik ini sudah dibuat dalam dokumen-dokumen penting.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mintzberg (Afif dan Abdullah, 2010: 54-55) strategi memiliki konsep yang sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan- tujuan jangka panjangnya

2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsisten ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa bahwa hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa penetapan tujuan dalam strategi penanganan konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik. hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen RPJMD, dalam Renstra dan Renja OPD sesuai tupoksi yang diampu oleh OPD menjadikan acuan langkah baik sehingga penetapan tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik dalam jangka waktu panjang. Dengan adanya penetapan tujuan juga maka bakesbangpol dapat melakukan aktivitas strategi penanganan konflik sesuai dengan penetapan tujuan.

**d. Adanya perumusan strategi alternatif dalam penanganan konflik.**

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menunjukkan bahwa perumusan strategi alternatif dalam penanganan konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perumusan strategi sesuai dengan visi misinya. Dengan adanya Tim Terpadu Penanganan Konflik menjadi salah satu capaian dalam mengembangkan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman. Maka adanya perumusan strategi alternatif juga sebagai penentu tujuan dengan cara penetapan pedoman kebijakan melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mintzberg, et all (Bastian, I. 2016:9) menyatakan bahwa 'Strategi sebagai perspektif, posisi, perencanaan, pola dan penipuan (5P)'.

a. Perspektif: Strategi membentuk misi yang dapat menggambarkan perspektif untuk seluruh aktivitas.

b. Posisi: Strategi mencari posisi, mencari pilihan untuk bersaing/berkompetisi.

c. Perencanaan: Strategi menentukan tujuan dari kinerja perusahaan.

d. Pola: Strategi membentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

e. Penipuan: Strategi merupakan taktikrahasia.

**2. Implementasi Strategi.**

Implementasi strategi merupakan tahapan manajemen strategis yang terdiri dari kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam sebuah tindakan. Implementasi tersebut di dalamnya terdapat proses dimana rencana strategis dan kebijakan dituangkan ke dalam tindakan seperti pengembangan program, anggaran serta prosedur.

**a. Adanyaaktivitas mengembangkan strategi dalam penanganan konflik.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa adanya aktivitas mengembangkan strategi dalam penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis sudah mulai dikembangkan. Hal ini dikatakan oleh informan bahwa strategi penanganan konflik yang dijalankan oleh badan kesbangpol sudah mulai berjalan dengan melakukan aktivitas. Sejalan dengan hasil observasi menunjukan bahwa aktivitas mengembangkan

strategi dalam penanganan konflik sedang berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam hal ini terlihat bahwa pihak kesbangpol melakukan aktivitas dalam menjalankan strategi penanganan konflik. Aktivitas yang dilakukannya yaitu berupa pengadaan rapat-rapat teknis, diskusi bersama dengan semua tim penanganan konflik yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkannya.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa aktivitas mengembangkan strategi dalam penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan aktivitas penanganan konflik sudah berjalan untuk menghasilkan kemajuan dari strategi yang dilakukannya. Hal ini dapat terealisasi karena adanya konsistensi para pihak yang bertugas dalam melakukan strategi penanganan konflik. Selain itu peluang tersebut tidak di sia-siakan hanya dengan memfokuskan pada satu kegiatan saja. Dalam artian pihak kesbangpol siap dalam mengambil resiko dan tetap berhati-hati sesuai dengan strategi, tentunya tidak lepas dari kontrol perkembangan agar tetap efektif berjalan sehingga berdampak baik pada aktivitas perkembangan strategi penanganan konflik tersebut.

Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Menurut Hatten (2010:26) memberi beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga ia bisa sukses:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus dan perkembangan dalam masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan yang tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatan dan tidak pada titik-titik kelemahannya. Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah

yang tepat untuk menempatkan posisi kompetitif yang lebih kuat.

5. Sumber daya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah suatu yang mungkin, haruslah membuat suatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendak
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi diatas kegagalan.
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi dinampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan terutama dari para eksekutif dan semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.
9. **Adanya menciptakan struktur organisasi yang efektif dalam strategi penanganan konflik.**

Menciptakan struktur organisasi yang efektif dalam strategi penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya menciptakan struktur organisasi yang efektif. Hal ini dikatakan oleh informan bahwa struktur organisasi yang ada di Badan Kesbangpol sudah ada tetapi dalam hal sumber daya manusianya masih kurang. Sehingga mengakibatkan pada proses melakukan strategi penanganan konflik menjadi terhambat.

hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa menciptakan struktur organisasi yang efektif dalam

strategi penanganan konflik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam struktur organisasi yang ada menunjukkan kurang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan strategi penanganan konflik sosial. Adanya program yang dilakukan untuk memperhaluskan respon yang tidak terlalu besar. Merupakan strategi menjadi terhambat karena masih kurangnya sumber daya manusia yang bertugas. Dengan kurang efektifnya struktur organisasi tersebut menghambat pula pada apa yang akan dilakukan oleh bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Maka dengan adanya pelaksanaan strategi penanganan konflik tidak dilakukan oleh pelaksana yang sesuai, tentunya dapat memungkinkan tujuan awal dari perencanaan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan meskipun tetap berjalan sesuai dengan yang diarahkannya.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Stoner, et al. (Mayasari, 2014:10) Strategi diartikan dua perspektif, yaitu:

1. Dari apa yang organisasi ingin lakukan, maksudnya sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan menerapkan sebuah misi.
2. Dari apa yang organisasi akhirnya lakukan, maksudnya pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

### **C. Adanya persiapan anggaran dalam strategi penanganan konflik**

Persiapan anggaran dalam strategi penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum cukup memadai. Hal ini dikatakan oleh informan bahwa persiapan anggaran yang diperlukan untuk keperluan strategi penanganan konflik masih kurang. Meskipun sudah sesuai dengan jadwal setiap 1 tahun sekali, namun tidak mencukupi untuk mengarah pada perkembangan strategi penanganan konflik ini menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan anggaran dalam strategi penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum mendapatkan anggaran yang maksimal. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Salah satunya dalam melakukan strategi alternatif yang membutuhkan anggaran cukup maksimal. Meskipun pihak kesbangpol melakukan upaya semaksimal mungkin dengan menggunakan anggaran yang ada, namun tetap dalam melakukan manajemen strategi penanganan konflik harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh sumber daya ekonomi yang tersedia dan memadai.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yunus, E. (2016:6) mengatakan bahwa karakteristik manajemen strategis adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen strategis bersifat jangka panjang
- b. Manajemen strategis bersifat dinamik
- c. Manajemen strategis merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional
- d. Manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak
- e. Manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan
- f. Manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

### **D. Adanya Pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dalam strategi penanganan konflik.**

Bahwa adanya pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dalam strategi penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis yang sudah cukup berkembang. Hal ini dikatakan oleh informan bahwa pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi sudah dijalankan sesuai dengan aplikasi maupun web yang dimuat untuk keperluan situasi dan kondisi konflik yang terjadi di Kabupaten Ciamis.



Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ward dan Peppard (2012:44) menyatakan bahwa: “Strategi TI (Teknologi Informasi) adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah organisasi.”

Selanjutnya Turban (2013:462) menyatakan bahwa: “Perencanaan strategi sistem informasi merupakan sekumpulan tujuan jangka panjang yang menggambarkan kebutuhan sistem dan arsitektur teknologi informasi untuk mencapai tujuan perusahaan.”

Dengan demikian, hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dalam strategi penanganan konflik sudah berkembang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya perkembangan informasi yang mengarah pada kemajuan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah organisasi. Selain hal itu dengan adanya strategi informasi mengenai penanganan konflik mendorong pada pencapaian tujuan jangka panjang yang telah direncanakan dengan baik. Menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dalam strategi penanganan konflik sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini terlihat dari adanya bukti aplikasi maupun web yang menginformasikan terkait konflik

sosial yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat pula dari adanya data-data yang dimasukkan ke dalam web tersebut sehingga diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis. Adapun data-data didalam nya terdiri dari pengaduan pelayanan publik nasional khususnya di Kabupaten Ciamis.

### **3. Evaluasi Strategi**

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi. Dimana evaluasi ini merupakan proses manajemen puncak mencoba menjamin bahwa strategi terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuannya.

#### **a. Adanya laporan perkembangan aktivitas dalam strategi penanganan konflik.**

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wardani (2010:16) menyatakan bahwa: “Laporan kegiatan adalah serangkaian tulisan yang harus berisi informasi dengan didukung oleh data secara tuntas sesuai dengan fakta yang ditemukan serta disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa laporan perkembangan aktivitas dalam strategi penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. hal ini terlihat dari adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan menuliskan

serangkaian tulisan yang berisi informasi data-data mengenai kegiatan dan konflik yang terjadi di Kabupaten Ciamis selama 1 tahun sekali yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami pada saat evaluasi melalui rapat rutin. Maka dari adanya laporan tersebut akan diambil keputusan untuk dijadikan acuan strategi penanganan konflik di waktu yang akan datang.

b. **Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan badan kesatuan bangsa dan politik dalam strategi penanganan konflik.**

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan badan kesatuan bangsa dan politik dalam strategi penanganan konflik oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari adanya keputusan-keputusan yang diambil oleh Badan Kesbangpol khususnya di Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik untuk selalu berkoordinasi dengan baik. Dengan adanya koordinasi tersebut tentunya menjadi salah satu peran penting untuk pengambilan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dirundingkan bersama mengenai potensi, gejala yang timbul di daerah Kabupaten Ciamis. Kemudian apabila penanganan konflik sosial sudah diselesaikan, namun koordinasi tetap dilakukan untuk

memperkuat sinergi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jain, K dan Srinivan, N. (Bastian, I. 2016:10) memiliki pendapat bahwa: “Setiap organisasi membutuhkan strategi apabila menghadapi situasi koordinasi antarbagian terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil organisasi dalam kurun waktu tertentu.”

c. **Adanya pengukuran kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam strategi penanganan konflik.**

Sejalan dengan hasil observasi menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam strategi penanganan konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang jelas terkait pengukuran kinerja pegawai dalam melakukan strategi penanganan konflik. Sehingga para pegawai yang melakukan kegiatan tidak akan memperdulikan parameter hasil untuk dicapai dalam melakukan proses kegiatan strategi menangani konflik. hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa belum terlihat adanya pengukuran kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam strategi penanganan konflik. Hal ini terlihat dari pengukuran kinerja yang dilakukannya tidak berdampak terhadap pengoptimalan strategi penanganan konflik yang akan dilakukan. Maka dengan tidak dibuatkannya regulasi yang jelas ini

menjadi penghambat pada pengukuran kinerja pegawai yang mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan menangani konflik yang terjadi. Sehingga dengan ketidakjelasan pengukuran kinerja menjadi faktor penghambat pula terhadap para pegawai yang tidak sungguh-sungguh atau menjadi peluang untuk tidak profesional melakukan strategi penanganan konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Menurut Wheelen (Yunus, E. 2016:5) “Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi- strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisis SWOT”.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Penanganan Konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Strategi Penanganan Konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara umum belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan tiga tahapan dalam proses

strategi manajemen sektor publik menurut David (Bastian, I. 2016:12), seperti: Belum berjalannya formulasi strategi penanganan konflik, belum adanya implementasi yang cukup dalam strategi penanganan konflik serta belum maksimalnya evaluasi strategi penanganan konflik. Strategi Penanganan Konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya pengembangan strategi dalam penanganan konflik belum sepenuhnya berkembang hal ini terbukti dari belum dilaksanakannya perencanaan pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), masih adanya kelemahan dalam strategi penanganan konflik hal ini terbukti dari belum adanya SDM Aparatur yg mumpuni dalam pengidentifikasian masalah, dan atau pengukuran kinerja SDM Aparatur, struktur organisasi yang belum efektif dalam strategi penanganan konflik hal ini terbukti bahwa dalam struktur organisasi yang ada menunjukkan kurang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan strategi penanganan konflik sosial, kurangnya persiapan anggaran dalam strategi penanganan konflik hal ini terbukti keterbatasan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis karena terdampak dari situasi dan kondisi pandemi, kurangnya pengukuran kinerja dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam strategi penanganan konflik hal ini terbukti belum dilakukannya secara penuh oleh SDM Aparatur karena regulasi nya selalu berubah-ubah dan disebabkan karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat melakukan strategi penanganan konflik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Penanganan Konflik Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis dilakukan berbagai upaya diantaranya melakukan peningkatan penanganan konflik di daerah dengan berkoordinasi dengan Intansi/Lembaga Vertikal yang ada di daerah; memperkuat dalam internal Bakesbangpol dengan Pendidikan pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afif dan Abdullah. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta.
- Aime, et al. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Sektor Publik*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2012. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, I. 2015. *Metode Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salusu, M.A. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Setiyono, B. 2014. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. Semarang: PT Buku Seru.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*. Bandung: Alfabeta.

- Sunyoto, D. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Tjokroamidjoyo & Mustopadidjoyo. 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wahyudi. 2015. *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*. Bandung: Alfabeta.
- Wilantara dan Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PTRefika Aditama.
- Winardi. 2012. *Manajemen Perilaku Organisasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Uchaimid Biridlo'i Robby dan Dedi Akhiruddin. 2021. *Strategi Kodim 1703 / Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat*. Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) Vol. 02 No. 01 Program Studi Administrasi Publik Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
- Mudzakkar. 2020. Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik. *Jurnal Off Economic, Management, and Accounting*. Vol. 3. No.2 (2020), hlm. 194-202. Universitas Andi Djemma, Palopo.

#### **DOKUMEN**

- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.